

Menggagas Jurnalisme Optimis dalam Pemberitaan tentang Bencana

Filosa Gita Sukmono & Fajar Junaedi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: filosa@umy.ac.id

***Abstract:** This article discusses the significances of disaster-sensitive journalism on the mass media's editorial. Yogyakarta and the surrounding areas are selected to be the case study due to the earthquake and the eruption occurred in 2006 and 2010. The disasters that endangered numerous journalists, ranging from field staff to head editors, made them not only be the witnesses, but also the victims. These experiences become one of the essential sources for the disaster-sensitive journalism or optimistic journalism. The term turns out to be the binary opposition of journalism of tears which is getting prevalent in the recent Indonesian mass media.*

***Keywords:** disaster, disaster-sensitive journalism, optimistic journalism*

***Abstrak:** Tulisan ini membahas pentingnya jurnalisme sensitif bencana dalam ruang redaksi media massa. Yogyakarta dan wilayah sekitarnya yang telah mengalami bencana gempa 2006 dan erupsi Merapi 2010 menjadi area yang menarik untuk dikaji. Para wartawan, mulai wartawan yang di lapangan sampai redaktur yang berada di ruang redaksi, menjadi saksi sekaligus korban bencana. Pengalaman menjadi saksi dan korban bencana telah menjadi laboratorium jurnalisme sensitif bencana yang disebut sebagai jurnalisme optimis. Istilah ini menjadi oposisi biner bagi jurnalisme air mata yang lebih umum digunakan oleh media massa di Indonesia.*

***Kata kunci:** bencana, jurnalisme optimis, jurnalisme sensitif bencana*

Beberapa bencana alam melanda Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Bencana yang mengemuka adalah gempa dan tsunami yang melanda Aceh dan beberapa daerah di Sumatera pada 2004, gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah pada 2006, erupsi Gunung Merapi pada 2010, dan banjir yang melanda Jakarta pada 2013. Beberapa bencana tersebut juga menjadi perhatian dunia setelah media massa internasional menjadikan bencana-bencana tersebut sebagai materi utama pemberitaan. Perhatian tersebut dilatarbelakangi oleh

besarnya skala bencana dan banyaknya jumlah korban.

Gempa di DIY dan Jawa Tengah pada 2006 dan erupsi Gunung Merapi pada 2010 yang menyebabkan kerusakan di kedua provinsi ini telah menjadi pembelajaran penting bagi para wartawan. Pembelajaran tersebut menyangkut praktik jurnalisme air mata yang melakukan komodifikasi pada korban bencana sebagai materi utama pemberitaan. Foto *close up* korban bencana di media cetak dan daring (*online*), serta video yang diambil dengan ukuran gambar

close up oleh wartawan dari lokasi bencana yang disiarkan melalui berita televisi menjadi pelajaran berharga mengenai pemberitaan tentang bencana.

Pembelajaran lain datang dari para wartawan di Yogyakarta yang saat kedua bencana tersebut terjadi tidak hanya berposisi sebagai wartawan peliput bencana, namun juga menjadi saksi dan sekaligus korban bencana. Dalam posisinya sebagai korban, wartawan bisa lebih merasakan penderitaan akibat bencana, sehingga lebih memiliki empati.

Media massa memiliki peran besar dalam komunikasi bencana, mulai dari informasi prabencana, bencana, hingga pascabencana yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Intensitas pemberitaan yang tinggi di berbagai media massa mengenai bencana alam dapat membangkitkan solidaritas berbagai kalangan masyarakat untuk menyalurkan bantuan kepada para korban. Bahkan beberapa perusahaan media membuka rekening pengumpulan dana dari masyarakat untuk membantu korban bencana. Meskipun demikian, kondisi yang tidak ideal juga terjadi dalam relasi antara media massa dan bencana, yaitu ketika media massa justru menyebarkan informasi yang menimbulkan kepanikan masyarakat.

Pada era informasi, media massa dan bencana memang memiliki hubungan kuat. Media massa dapat membuat masyarakat dapat mengetahui perkembangan terkini kondisi di lokasi bencana. Pada titik inilah jurnalisme sensitif bencana sangat dibutuhkan. Dalam perspektif jurnalisme sensitif bencana, media massa menjadi salah

satu elemen krusial ketika bencana terjadi. Dalam pengertian idealnya, jurnalisme sensitif bencana merupakan praktik jurnalisme yang mengandung banyak informasi dan pesan moral, serta tidak menimbulkan kepanikan atau dramatisasi keadaan mengenai bencana yang terjadi. Namun, idealisme tentang jurnalisme sensitif bencana tersebut masih belum tercapai. Beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan hal tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi Indra Astuti pada 2011 tentang pemberitaan bencana erupsi Gunung Merapi di tiga stasiun televisi, yaitu TVOne, MetroTV, dan SCTV, menyimpulkan bahwa praktik jurnalisme ketiga stasiun televisi ini masih memiliki kekurangan. Pada penelitian tersebut, kekurangan dalam peliputan bencana disimpulkan dalam tiga poin. Pertama, rendahnya mutu liputan. Kekurangan yang sangat terasa adalah ketersediaan data-data penunjang terkait aktivitas letusan Gunung Merapi. Pada hari kedua bencana, relatif hanya SCTV saja yang sudah menyiapkan data-data tentang aktivitas Gunung Merapi maupun vulkanologi bencana (Astuti, 2011, h. 189).

Kedua, rendahnya kapabilitas reporter dalam meliput bencana, terutama pada liputan *on the spot*. Hal ini terlihat dari kekacauan bahasa dan struktur gramatika reporter yang justru mengaburkan fakta dan substansi bencana. Alhasil, pemberitaan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan para korban bencana dan khalayak.

Ketiga, minimnya perhatian dan kesadaran media terhadap kepentingan

publik. Bencana masih dipersepsi oleh media sebagai peristiwa yang sensasional dengan nilai dramatis tinggi. Pemberitaan berfokus pada drama peristiwanya, bukan pada upaya-upaya konstruktif mengatasi bencana atau mitigasi pascabencana (Astuti, 2011, h. 189).

Penelitian lain dilakukan oleh Fajar Junaedi pada 2011 tentang pemberitaan bencana erupsi Gunung Merapi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan beberapa kelemahan praktik jurnalisme dalam peliputan bencana. Pertama, pemberitaan tentang guguran awan panas Gunung Merapi. Sebelum erupsi terbesar meletus, salah satu stasiun televisi memberitakan guguran awan panas yang diklaim mencapai 25 kilometer. Faktanya, material yang mencapai 25 kilometer bukanlah guguran awan panas, melainkan hujan abu vulkanik.

Kedua, adanya pemberitaan televisi yang mencampuradukkan fakta dengan mistik dan klenik. Penelitian tersebut memperlihatkan adanya pencampuradukan mitos, misalnya pemberitaan tentang sosok *mbah* Marijan. Pencampuradukan fakta dengan klenik dan mistik ini semakin terlihat ketika tayangan *infotainment* Silet juga mengangkat tema erupsi Gunung Merapi. Tayangan *infotainment* ini menampilkan sisi klenik Gunung Merapi yang justru menimbulkan keresahan masyarakat. Pada tayangan Silet edisi Minggu, 7 November 2010, Fenny Rose, pembawa acara program tersebut, menyatakan bahwa akan terjadi letusan dahsyat Gunung Merapi pada 8 November 2010 dan menyebut Yogyakarta sebagai kota malapetaka.

Ketiga, jurnalis salah satu stasiun televisi memberitakan tentang penjarahan yang terjadi di lokasi bencana setelah erupsi Gunung Merapi. Pemberitaan tentang penjarahan ini memantik reaksi para korban dan masyarakat yang tinggal di kawasan Gunung Merapi. Mereka memprotes keras pemberitaan yang dianggap tidak akurat ini. Keempat, pemberitaan bencana erupsi Gunung Merapi cenderung mengeksploitasi para korban. Hal ini bisa dibuktikan dengan tayangan televisi yang memperlihatkan tubuh korban yang terpanggang awan panas. Pengambilan gambar korban yang terpanggang pun dilakukan dengan medium *close up* dan *close up*, sehingga layar kaca televisi menghadirkan horor ke hadapan pemirsanya (Junaedi, 2011, h. 384-387).

Sementara itu, pada 2010, Ahmad Arif melakukan penelitian tentang jurnalisme dan bencana dalam kasus gempa dan tsunami yang terjadi di Sumatera pada 2004. Penelitian yang berfokus pada Aceh yang paling terkena dampak bencana ini menunjukkan bahwa media massa di Indonesia saat itu mengalami kesulitan mendapatkan akses informasi bencana di hari-hari pertama bencana. Alih-alih melaporkan informasi tentang Aceh, media massa Indonesia justru mendapatkan informasi tentang dampak tsunami di India, Thailand, dan Srilanka dan mengolah informasi yang mereka peroleh menjadi bahan berita untuk audiens di Indonesia (Arif, 2010, h. 68).

Awalnya, tidak ada liputan yang menggambarkan kondisi Aceh sebenarnya karena telekomunikasi dan transportasi

terputus akibat bencana. Kondisi berubah ketika wartawan datang ke Aceh. Media massa dipenuhi dengan gambar mayat bergelimpangan yang berbaur dengan bangkai mobil dan puing berserak, serta rekaman video amatir orang-orang yang berlarian menghindari kejaran air tsunami. Televisi memperdengarkan teriakan kengerian yang berbaur dengan ratapan orang-orang yang kehilangan anggota keluarga dan diiringi lagu yang mengalun sedih. Tayangan dari lokasi bencana yang disiarkan oleh MetroTV diulang secara terus-menerus dan diimbui gambar penyiar yang menangis. Stasiun televisi lain juga melakukan praktik jurnalisme yang sama (Arif, 2010, h. 77). Jurnalisme air mata dipertontonkan dengan vulgar oleh media massa dalam peliputan dan pelaporan bencana gempa dan tsunami Aceh.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jurnalisme bencana yang pada hakikatnya merupakan tugas suci, ternyata diwarnai dengan praktik-praktik yang belum ideal. Air mata korban bencana masih menjadi bahan eksploitasi pemberitaan. Ketiga penelitian tersebut dengan gamblang menunjukkan bahwa telah terjadi komodifikasi bencana dalam praktik jurnalisme bencana di Indonesia. Alih-alih memberikan informasi tentang mitigasi bencana, ketiga penelitian tersebut justru menunjukkan bahwa bencana dikemas sebagai komoditas pemberitaan yang disajikan kepada khalayak dengan mengutamakan air mata korban sebagai isu utama. Idealisme tentang jurnalisme sensitif bencana justru tidak terjadi dalam praktik jurnalisme di Indonesia.

Persoalan di atas menuntun penelitian ini untuk mencari model peliputan, pengolahan, dan pelaporan bencana yang ideal dalam jurnalisme. Penelitian ini krusial dalam dunia jurnalisme karena dapat menghasilkan model jurnalisme sensitif bencana yang baik dan ideal. Penelitian ini pun bisa menjadi rekomendasi untuk pihak-pihak yang terkait dengan bencana dan media massa.

METODE

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ini menggunakan metode studi kasus. Metode studi kasus berusaha menjelaskan sebuah realitas sosial secara menyeluruh. Peneliti bersikap hati-hati dan teliti agar semua realitas yang dilihat dapat tercatat dengan baik. Metode yang berada di bawah payung paradigma positivistik ini menuntun peneliti untuk mengambil jarak dengan objek penelitian dan bersikap netral terhadap realitas yang dihadapinya.

Cara pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak memiliki struktur ketat, tidak dalam suasana formal, dan bisa dilakukan berulang pada informan. Teknik ini dilakukan pada semua informan. Bagian terpenting dalam wawancara mendalam adalah mengajukan pertanyaan yang ada di panduan wawancara, mengembangkannya menjadi berbagai pertanyaan, dan mencatat jawaban informan atas pertanyaan yang diajukan secara akurat (Neuman, 2000, h. 277).

Proses pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* atau

criterion-based selection. Peneliti memilih informan yang dipandang paling tahu, sehingga kemungkinan pemilihan informan dapat berkembang sesuai kebutuhan peneliti. Informan penelitian ini adalah Octo Lampito (pemimpin redaksi harian *Kedaulatan Rakyat*) dan Anton Wahyu (pemimpin redaksi *Harian Jogja*). Pertimbangan pemilihan keduanya adalah posisinya sebagai penanggung jawab redaksional dua koran terbesar di Yogyakarta saat terjadi bencana gempa 2006 dan erupsi Gunung Merapi 2010.

Dua informan lainnya adalah Bambang Muryanto (wartawan *The Jakarta Post*) yang berpengalaman melakukan peliputan gempa 2006 di Yogyakarta dan erupsi Gunung Merapi 2010 dan Lalita Gandaputri (reporter MetroTV) yang secara langsung meliput erupsi Gunung Merapi 2010.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan prosedur analisis antarkasus (*cross-site analysis*) (Neuman, 2000, h. 32). Analisis dengan prosedur seperti ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi *micro level* yang berupa tindakan individual hingga *macro level* yang berupa proses dan struktur sosial yang luas (Vaughan dalam Neuman, 2000, h. 33).

Analisis model interaktif dipakai pada setiap kasus dengan tiga komponennya, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi dalam proses siklus (Miles dan Huberman dalam Sutopo, 2002, h. 186). Reduksi data merupakan bagian proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari catatan lapangan. Sementara itu, sajian data merupakan suatu rakitan organisasi

informasi dan deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Penarikan simpulan perlu diverifikasi agar mantap dan bisa dipertanggungjawabkan.

Aktivitas pengulangan perlu dilakukan untuk tujuan pemantapan dan penelusuran data kembali dengan cepat. Verifikasi dapat juga dilakukan dengan usaha replikasi data yang lain dan mengembangkan ketelitian, sehingga simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan bisa dipercaya (Sutopo, 2002, h. 90-93).

HASIL

Pengertian bencana menurut Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pengertian bencana secara legal-formal tersebut mengindikasikan bahwa setiap penanganan bencana tidak hanya mengandalkan kemampuan untuk memberikan bantuan materiel saja, tetapi juga memberikan dukungan moral kepada korban. Komunikasi yang berpedoman pada etika dan substansi komunikasi dalam penyampaian pesan dari satu sumber ke sumber lain yang bertujuan mendapatkan pemahaman dan pemaknaan bersama menjadi esensial dalam memberikan bantuan terhadap penanganan bencana (Susanto, 2011, h. 5).

Pada titik inilah peran media massa menjadi krusial. Media massa di Indonesia masih berfokus pada bencana yang dimaknai sebagai peristiwa sensasional dengan nilai dramatis tinggi (Astuti, 2011, h. 189). Hal ini merujuk pada tiga penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arif (2010), Santi Indra Astuti (2011), dan Fajar Junaedi (2011).

Pemahaman mengenai bencana tersebut justru mengaburkan esensi jurnalisme bencana dalam memberikan informasi kebencanaan yang berorientasi pada korban. Jurnalisme bencana yang dibingkai dalam pemahaman seperti ini lebih banyak menyajikan air mata dan darah (Arif, 2010, h. 77). Jurnalisme model ini disebut sebagai jurnalisme air mata dan merujuk pada praktik jurnalisme bencana yang menyajikan penderitaan korban bencana secara dramatis. Dramatisasi terhadap penderitaan korban terutama ditunjukkan dengan penyajian foto dan video para korban bencana dalam ukuran bingkai *close up* dengan fokus pada penderitaan yang dialami oleh korban.

Ada dua bencana besar yang terjadi di Yogyakarta dalam periode waktu yang berdekatan, yaitu gempa pada 2006 dan erupsi Gunung Merapi pada 2010. Kedua bencana ini menempatkan wartawan di Yogyakarta dalam dua posisi sekaligus, yaitu sebagai wartawan dan korban. Dalam posisinya sebagai korban, bisa dipetakan dua posisi, yaitu wartawan yang secara langsung terdampak bencana dan wartawan yang tidak menjadi korban langsung

bencana namun memiliki keluarga yang terkena dampaknya. Beragam praktik jurnalisme bencana yang dilakukan oleh wartawan di Yogyakarta didasarkan pada dua posisi tersebut.

Pengalaman peliputan erupsi Gunung Merapi disampaikan oleh Octo Lampito. Di koran *Kedaulatan Rakyat* yang dipimpinnya, wartawan yang terjun ke lokasi bencana dibekali pemahaman bahwa keselamatan wartawan merupakan hal utama. Menurut Octo Lampito, tidak ada berita seharga nyawa. Meskipun demikian, Octo Lampito mengakui bahwa pelatihan tentang keselamatan bencana yang diberikan oleh perusahaan media kepada wartawan masih kurang.

Kebijakan redaksional *Kedaulatan Rakyat* tentang pengemasan berita bencana tidak memperkenankan eksploitasi penderitaan dan kesedihan korban bencana. Octo Lampito menyebutkan bahwa praktik jurnalisme yang hanya mengedepankan penderitaan dan kesedihan korban bencana adalah praktik jurnalisme air mata. Praktik jurnalisme air mata inilah yang seharusnya dihindari oleh wartawan saat melakukan liputan. Di ruang redaksi, berita yang ditulis oleh wartawan diseleksi secara ketat agar berita yang muncul dalam penerbitan *Kedaulatan Rakyat* tidak mengandung perspektif jurnalisme air mata (Octo Lampito, pemimpin redaksi *Kedaulatan Rakyat*, wawancara, 26 Juli 2016).

Pengalaman yang sama juga dialami Lalita Gandaputri, reporter MetroTV yang langsung meliput erupsi Gunung Merapi pada 2010 dan kini menjabat

sebagai produser MetroTV Jakarta yang ditempatkan sebagai kepala biro MetroTV Bandung.

Di awal bencana, tidak ada bantuan teknis karena kami beradaptasi sendiri di lapangan. Jadi berdasarkan pembelajaran saja. Misalnya begini, kami harus menyiapkan HT (*Handy Talkie*). HT itu penting untuk keamanan kami juga. Selain itu, juga ada radio komunikasi komunitas merapi, nah itu yang penting. Itu yang harus ada ketika kita liputan di sana, sehingga tidak gegabah bergerak tanpa informasi. Sepertinya pengalaman saya waktu kemarin itu justru di lapangan yang tahu bagaimana standar *safety*-nya. Nah kemudian setelah merapi meletus beberapa kali, barulah dari kantor Jakarta memberi (standar) *safety*. Kayak sepatu bot, terus *google* (kaca mata) buat menghadapi debu sekaligus masker. (Lalita Gandaputri, reporter MetroTV, wawancara, 25 September 2016)

Pengalaman liputan yang disampaikan oleh Lalita Gandaputri memperlihatkan bahwa media massa di Indonesia tidak siap menghadapi bencana. Ketidaksiapan ini menyangkut dua hal, yaitu prosedur keamanan dan peralatan keselamatan bagi wartawan yang diterjunkan di area bencana. Lalita Gandaputri tercatat sebagai reporter televisi yang berhasil melakukan liputan di lokasi paling terdampak bencana erupsi Gunung Merapi 2010. Latar belakangnya sebagai alumni sebuah universitas di Yogyakarta memberi modal berharga, yaitu pengenalan medan bencana dan akses jejaring untuk mendapatkan informasi kebencanaan Gunung Merapi.

Pengalaman Octo Lampito dan Lalita Gandaputri tersebut dilengkapi oleh Sulis, wartawan RBTv. Ia ini menjelaskan tentang pentingnya kartu pengenal (*ID Card*) dan pengetahuan seorang wartawan dalam meliput sebuah bencana di tempat tertentu.

ID Card yang sering tidak digunakan oleh seorang wartawan membuat narasumber menjadi ragu dalam mengungkapkan informasi kepada wartawan tersebut.

Ketika meliput bencana, wartawan yang meliput harus memiliki *ID Card*. Oleh karena itu, setiap jurnalis yang akan terjun ke lapangan harus memperhatikan *ID Card* sebagai identitas resmi di lapangan. Kita sebagai orang media, ketika ingin meliput, harus memiliki bekal yang cukup. (Sulis, wartawan RBTv, wawancara, 26 Juli 2016)

Sementara itu, Bambang Muryanto menyebutkan bahwa praktik komodifikasi dalam pemberitaan bencana terjadi karena banyak persoalan teknis yang dihadapi wartawan saat meliput di lokasi bencana, misalnya kesulitan mendapatkan akses ke sumber primer. Dalam jurnalisme bencana, sumber primer di lokasi bencana merupakan sumber informasi krusial karena sumber primer inilah yang mengetahui langsung kejadiannya. Kesulitan ini juga bersumber dari jalur evakuasi yang belum ditata dengan baik sebelum gempa melanda Yogyakarta pada 2006 dan erupsi Gunung Merapi pada 2010 (Bambang Muryanto, wartawan *The Jakarta Post*, wawancara, 26 Juli 2016).

Bambang Muryanto juga menyoroti tentang minimnya pengetahuan jurnalis tentang dampak bencana untuk perempuan dan anak, sehingga perspektif perempuan dan anak tidak muncul dalam pemberitaan.

Persoalan yang banyak terjadi di Jogja adalah edukasi mengenai bagaimana cara pengurangan dampak bencana. Jurnalis sering lupa untuk menggunakan perspektif perempuan dan anak. (Bambang Muryanto, wartawan *The Jakarta Post*, wawancara, 26 Juli 2016)

Lalita Gandaputri menambahkan bahwa reportase yang dilakukannya saat itu mengutamakan aspek keselamatan. Lalita Gandaputri mengakui bahwa pendidikan jurnalisme bencana yang belum banyak dilakukan oleh media massa di Indonesia menjadikan wartawan yang meliput langsung di lokasi bencana harus belajar secara autodidak (Lalita Gandaputri, reporter MetroTV, wawancara, 25 September 2016). Hal ini sejalan dengan pernyataan Octo Lampito mengenai pendidikan kebencanaan bagi wartawan yang akan diterjunkan ke lokasi bencana.

Berkaitan dengan tantangan yang dihadapi wartawan di lokasi bencana, Anton Wahyu menyebutkan bahwa tantangan dalam konteks teknis jurnalisme bencana adalah kemampuan reporter yang diterjunkan ke lokasi bencana dan persiapan alat dan perlengkapan peliputan. Reporter yang diterjunkan ke lokasi bencana seharusnya memiliki kemampuan yang memadai dalam aspek jurnalisme dan kebencanaan, serta didukung dengan alat dan perlengkapan yang memadai. Alat dan perlengkapan tersebut tidak hanya menyangkut alat dan perlengkapan untuk tugas jurnalistik, tetapi juga alat dan perlengkapan keselamatan bencana (Anton

Wahyu, pemimpin redaksi *Harian Jogja*, wawancara, 26 Juli 2016).

Anton Wahyu juga menjelaskan bahwa banyaknya jumlah wartawan yang menjadi korban disebabkan oleh kurangnya pengetahuan teknis dalam peliputan bencana dan minimnya peralatan yang digunakan atau dibawa. Hal ini merupakan pekerjaan rumah untuk insan pers di Indonesia.

Kemudian dalam konteks teknis yaitu kemampuan reporter dan persiapan alat dan perlengkapan saat peliputan. Dalam hal teknis pernah terjadi beberapa kali insiden yang justru mengakibatkan jurnalis yang sedang meliput bencana malah menjadi korban dari bencana itu sendiri. Hal tersebutlah yang seharusnya menjadi perhatian insan pers yang ada di Indonesia. Maka dari itu, perlu ada suatu pengetahuan yang terkait dengan bencana. PR besar dalam peliputan bencana adalah masalah etika dari para reporter maupun jurnalis yang sedang meliput di lokasi bencana. (Anton Wahyu, pemimpin redaksi *Harian Jogja*, wawancara, 26 Juli 2016)

Kecakapan wartawan dalam aspek jurnalisme dan kebencanaan, serta didukung ketersediaan alat dan perlengkapan yang memadai menjadi pondasi kuat jurnalisme optimis, yaitu praktik jurnalisme dalam bencana yang mengedepankan edukasi mitigasi bencana kepada audiens. Setiap orang di lokasi bencana pada dasarnya adalah orang yang mengalami kelelahan, kemarahan, dan trauma. Situasi seperti ini menuntut aktivitas

Tabel 1 Perbandingan Jurnalisme Air Mata dan Jurnalisme Optimis

| Jurnalisme Air Mata | Jurnalisme Optimis |
|--|---|
| Mengeksploitasi penderitaan korban bencana. | Tidak mengeksploitasi penderitaan korban bencana. |
| Tidak memiliki sensitivitas pada penderitaan korban bencana. | Mengedepankan sensitivitas pada penderitaan korban bencana. |
| Informasi mitigasi bencana kurang diperhatikan. | Informasi mitigasi bencana diperhatikan dengan baik. |
| Fungsi edukasi media kurang. | Fungsi edukasi media menjadi aspek utama. |
| Mencampurkan mitos dengan berita. | Mitos dipahami sebagai kearifan lokal. |
| Tidak mengedepankan optimisme pada korban. | Optimisme pada korban menjadi perspektif utama. |

Sumber: Data primer

wawancara terhadap korban bencana dengan penuh rasa hormat (Arif, 2010, h. 169).

Penghormatan pada korban bencana mengindikasikan bahwa wartawan bukan sekadar meliput untuk mendapatkan bahan berita. Wartawan juga berbagi harapan dengan korban bencana, baik saat meliput maupun memberitakan hasil liputannya.

PEMBAHASAN

Beragam bencana yang terjadi di Indonesia pada periode 2001-2010 telah memberi banyak pelajaran penting mengenai praktik jurnalisme bencana di Indonesia. Pada dekade tersebut dan tentu saja dekade-dekade sebelumnya, praktik jurnalisme bencana justru melahirkan bencana jurnalisme.

Lokasi bencana yang sulit diakses oleh wartawan karena jarak yang jauh, sarana transportasi terbatas, dan lokasi yang tertutup akibat konflik tentu kondisinya lebih memprihatinkan. Kondisi semacam itulah yang menyebabkan wartawan terlambat masuk ke Aceh saat gempa dan tsunami melanda provinsi itu pada 2004. Berita tentang kondisi riil di Aceh pun terlambat diketahui publik. Besarnya skala kerusakan yang tidak terbayangkan oleh wartawan yang meliput langsung bencana tersebut menambah runyam praktik jurnalisme bencana kala itu. Lubang gelap jurnalisme bencana semakin gulita karena komunikasi publik pejabat yang berwenang runtuh berbarengan dengan infrastruktur Aceh yang hancur (Arif, 2010, h. 72).

Masalah berbeda muncul pada praktik jurnalisme bencana saat erupsi Gunung Merapi masih diwarnai beragam

kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain rendahnya mutu peliputan, kurangnya kapasitas reporter dalam meliput bencana, dan minimnya perhatian dan kesadaran yang dibangun oleh media terhadap kepentingan publik dalam meliput bencana (Astuti, 2011, h. 189). Jurnalisme air mata secara nyata masih terjadi saat media massa memberitakan erupsi Gunung Merapi.

Pelanggaran etika penyiaran televisi sudah lama terjadi. Hal ini semakin terlihat ketika pelanggaran tersebut menimbulkan masalah dan menyebabkan banyak orang merasa dirugikan. Kebebasan pers akan menjadi kesalahan pers jika praktiknya justru merugikan masyarakat, terutama ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai nurani dan melanggar etika. Tindakan media televisi saat memberi informasi menuntut sikap dari khalayak karena pengambilan sudut pandang berita yang berbeda-beda oleh setiap stasiun televisi.

Di sisi lain, masyarakat yang menjadi korban bencana menginginkan informasi yang disampaikan media dapat membantu mereka untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, penyampaian berita bencana harus berdasarkan etika dan nurani jurnalis agar pemberitaan oleh media televisi tidak berlebihan, namun sesuai fakta yang ada dan mampu menarik simpati khalayak yang menyaksikannya (Riski, Kiswandono, & Rozaq, 2011, h. 116).

Etika merupakan hal penting dalam praktik jurnalisme sensitif bencana. Etika dapat dimaknai sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan moral seseorang atau sekelompok orang untuk

mengatur tingkah lakunya. Etika juga dapat diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering disebut sebagai kode etik (Bertens, 2005, h. 6). Oleh karena itu, Kode Etik Jurnalistik menjadi hal krusial bagi wartawan dalam meliput bencana.

Etika dapat pula berarti ilmu yang mempelajari hal yang baik dan buruk di masyarakat. Etika berkembang menjadi ilmu ketika kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang sesuatu yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima suatu masyarakat, baik yang disadari maupun tidak disadari, menjadi bahan refleksi bagi penelitian sistematis dan metodis. Arti etika yang terakhir ini mengindikasikan bahwa etika sama dengan filsafat moral (Bertens, 2005, h. 6). Menurut perspektif ini, pemberitaan yang menampilkan air mata dalam jurnalisme bencana adalah hal yang salah dan buruk.

Sementara itu, jurnalisme optimis mengutamakan ketepatan data dan fakta. Kedua hal tersebut, bagi seorang jurnalis, merupakan modal utama untuk menciptakan karya jurnalistik yang baik. Selain data dan fakta, saat meliput bencana, seorang jurnalis harus mampu mengoptimalkan pengamatannya dan tidak terlepas dari syarat-syarat berita, seperti faktual, objektif, berimbang, lengkap (memenuhi 5 W dan 1 H), dan akurat. Jurnalis harus mampu memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk menciptakan kesiapsiagaan. Jurnalis dituntut untuk dapat mengonstruksi anggapan bahwa bencana merupakan peristiwa yang harus diwaspadai

supaya tidak menimbulkan korban (Febrian, Rizky, & Perdana, 2011, h. 91).

Para informan penelitian ini menyebutkan bahwa penyampaian berita dalam jurnalisme optimis harus menanamkan prinsip *cover both sides* (berimbang). Wartawan dituntut kejujurannya (*sincerity*) agar informasi tentang peristiwa yang terjadi dapat ditulis secara objektif dan sesuai fakta. Selain itu, berita juga tidak boleh memasukkan opini pribadi reporter. Berita mengenai peristiwa bukanlah karangan, tetapi laporan kejadian sesuai fakta.

Kritik pedas terhadap praktik jurnalisme bencana telah menyebabkan perubahan besar, terutama pada jurnalisme televisi. Berita televisi lebih mengedepankan gambar-gambar yang mampu bercerita banyak hal kepada khalayak. Narasi atau naskah tulisan hanya sebagai pendukung. Oleh karena itu, seorang reporter harus menulis berita televisi berdasarkan gambar yang dimilikinya (Harahap, 2006, h. 36).

Sebelumnya, jurnalisme air mata lebih mengemuka dan mencolok, terutama pada praktik jurnalisme televisi. Kini, jurnalisme optimis lebih diutamakan dalam praktik jurnalisme bencana di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar terjadi pada regulasi mengenai proses yang selayaknya dilakukan dalam praktik jurnalisme bencana. Regulasi ini tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

P3SPS bab XXIV pasal 34 tentang peliputan bencana alam menyebutkan beberapa ketentuan bagi lembaga penyiaran

dalam meliput dan atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah. Pertama, peliputan subjek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya. Kedua, tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan, korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan mengintimidasi korban dan atau keluarganya untuk diwawancarai dan atau diambil gambarnya dan menyiarkan gambar korban dan atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan.

Regulasi di ranah jurnalisme penyiaran ini juga bisa diterapkan pada jurnalisme cetak maupun daring. Sayangnya, regulasi yang sudah cukup baik dan mengarah pada jurnalisme optimis ini seolah-olah tidak dibaca secara cermat oleh wartawan media massa di Indonesia.

Paradigma jurnalisme optimis ini ditempatkan pada tiga fase jurnalisme bencana. Pertama, fase prabencana. Jurnalis yang terjun ke lokasi bencana bertanggung jawab memberikan informasi terkini yang akurat kepada masyarakat di sekitar lokasi bencana yang memiliki potensi terdampak bencana. Kedua, fase bencana. Jurnalis harus mengedepankan empati pada korban bencana. Peliputan bencana juga perlu menyajikan karya jurnalistik yang memberikan harapan dan mengajak masyarakat belajar dari bencana. Ketiga, fase pascabencana. Jurnalis perlu

mengabarkan tentang rekonstruksi bencana agar sesuai dengan peruntukannya (Arif, 2011, h. 68).

Pemberitaan pascabencana menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi kebutuhan mendesak korban bencana dan kebutuhan jangka panjang korban bencana (Badri, 2011, h. 168). Bambang Muryanto menyatakan bahwa persoalan korupsi dana rekonstruksi pascagempa Yogyakarta 2006 yang seharusnya juga menjadi pokok persoalan tidak banyak mendapat perhatian (Bambang Muryanto, wartawan *The Jakarta Post*, wawancara, 26 Juli 2016).

Profesionalisme wartawan juga menjadi tolok ukur penerapan jurnalisme optimis. Wartawan dituntut profesional dalam praktik jurnalistik di bidang apapun. Istilah profesional memiliki tiga arti. Pertama, profesional adalah kebalikan dari amatir. Kedua, sikap pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus. Ketiga, norma-norma yang mengatur perilakunya dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca.

Selanjutnya, ada dua norma yang dapat diidentifikasi. Pertama, norma teknis, yaitu keharusan menghimpun berita dengan cepat, keterampilan menulis, dan menyunting. Kedua, norma etis, yaitu kewajiban kepada pembaca dan nilai-nilai, seperti tanggung jawab, tidak memihak, peduli, adil, dan objektif, yang harus tercermin dalam hasil tulisannya (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2005, h. 115).

Pemahaman tentang jurnalisme optimis yang berjalan seiring dengan profesionalisme wartawan harus menjadi acuan bagi para wartawan sebelum

dan saat melakukan peliputan bencana, sehingga berita yang ditulisnya selalu memiliki sensitivitas terhadap korban bencana. Pemahaman ini penting diketahui oleh wartawan. Menurut Shoemaker dan Reese (1996, h. 63), pemberitaan di media sangat dipengaruhi oleh latar belakang profesional dan pengalaman wartawan, peran profesional dan etika wartawan, serta nilai, sikap, dan kepercayaan wartawan. Wartawan perlu menempatkan diri sebagai seorang profesional yang taat pada etika profesionalismenya dalam pemberitaan bencana, sekaligus juga harus menebarkan nilai dan sikap positif kepada audiens melalui pemberitaan yang diproduksinya.

SIMPULAN

Para informan menyatakan bahwa sejak prapeliputan kebencanaan, wartawan sudah harus memiliki kepekaan terhadap bencana dengan mengedepankan jurnalisme sensitif bencana. Dalam tataran praktis, jurnalisme sensitif bencana ditabalkan dengan nama jurnalisme optimis. Praktik jurnalisme optimis ini menjadi negasi atas jurnalisme air mata yang selama ini mewarnai pemberitaan tentang bencana.

Jurnalisme optimis merupakan bagian integral dari praktik jurnalisme profesional yang berdasarkan pada etika. Kualitas jurnalisme di Indonesia, terutama dalam konteks jurnalisme bencana, perlu ditingkatkan dari sisi profesionalisme dan etika. Hal ini dapat dilakukan dengan menjadikan jurnalisme optimis sebagai arus utama dalam jurnalisme bencana dan meninggalkan jurnalisme air mata.

Edukasi mengenai paradigma jurnalisme optimis dalam peliputan bencana di daerah mana pun kepada para wartawan dan calon wartawan sangat krusial untuk terus dilakukan. Jurnalisme optimis mendorong peliputan terhadap bencana apapun dapat menampilkan informasi yang akurat, harapan, dan optimisme para korban bencana.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, A. (2010). *Jurnalisme bencana, bencana jurnalisme*. Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Arif, A. (2011). Jurnalisme bencana: Tugas suci, praktik cemar. Dalam Setio Budi HH (ed). *Komunikasi bencana*. Yogyakarta, Indonesia: Aspiikom dan Buku Litera.
- Astuti, S. I. (2011). Kabar bencana di layar kaca: Beberapa catatan terhadap pemberitaan letusan Merapi 2010 di televisi Indonesia. Dalam Setio Budi HH (ed). *Komunikasi bencana*. Yogyakarta, Indonesia: Aspiikom dan Buku Litera.
- Badri, M. (2011). Paradigma jurnalisme bencana. Dalam Setio Budi HH (ed). *Komunikasi bencana*. Yogyakarta, Indonesia: Aspiikom dan Buku Litera.
- Bertens, K. (2005). *Etika*. Jakarta, Indonesia: Gramedia.
- Febrian, A., Rizky, S., & Perdana, Y. (2011). Bencana dalam berita. Dalam Fajar Junaedi, Yuhan Perdana, & Danar Kristiana (ed). *Bencana komunikasi bencana*. Surakarta, Indonesia: Program Studi Ilmu Komunikasi UMS dan Lingkar Media.
- Harahap, A. S. (2006). *Junalistik televisi: Teknik memburu dan menulis berita TV*. Jakarta, Indonesia: PT Indeks.
- Junaedi, F. (2011). Manajemen penyiaran bencana. Dalam Setio Budi HH (ed). *Komunikasi bencana*. Yogyakarta, Indonesia: Aspiikom dan Buku Litera.

- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran*. Jakarta, Indonesia: KPI.
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2005). *Jurnalistik: Teori dan praktik*. Bandung, Indonesia: PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, L. W. (2000). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (4th ed). London, United Kingdom: Sage.
- Riski, H., Kiswando, A., & Rozaq, H. (2011). Bencana masuk televisi. Dalam Fajar Junaedi, Yuhan Perdana, & Danar Kristiana (ed). *Bencana komunikasi bencana*. Surakarta, Indonesia: Program Studi Ilmu Komunikasi UMS dan Lingkar Media.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. W. (1996). *Mediating the message: Theories of influences on mass media content*. New York, United States of America: Longman.
- Susanto, E. H. (2011). Komunikasi bencana, aspek makro dan aspek mikro. Dalam Setio Budi HH (ed). *Komunikasi bencana*. Yogyakarta, Indonesia: Aspikom dan Buku Litera.
- Sutopo, H. B. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Surakarta, Indonesia: UNS Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana*. (2007). <https://www.bnppb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf>